

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan pesat. Perhatian kini terpusat pada praktik akuntansi di lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan organisasi publik lainnya. Permintaan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas publik dari lembaga – lembaga sektor publik agar sesuai dengan harapan masyarakat mengenai sektor publik pemerintah (Mardiasmo, 2018:1). Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat informasi bagi pemerintah untuk manajemen internal dan sebagai sumber informasi bagi publik untuk memenuhi kebutuhan demi terciptanya kesejahteraan publik.

Revolusi Industri 4.0 telah menjadi istilah umum di kalangan masyarakat saat ini. Kehadiran revolusi industri 4.0 ini memberikan dampak yang cukup besar dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sektor – sektor lainnya (Supriyadi & Asih, 2020). Pemerintah didorong untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan proses internal. Dengan demikian, peluang efisiensi sangat penting diterapkan oleh pemerintah untuk keberhasilan dalam kegiatan operasional pemerintahan salah satunya melalui digitalisasi administrasi publik dan otomasi proses bisnis atau yang dikenal dengan *e-government*.

E-government sebagai pendukung konsep pemerintahan terbuka (Open Government) mengimplementasikan segala aktivitas pemerintah dengan memanfaatkan teknologi elektronik atau digital (Yusuf et al., 2023). Perkembangan *e-government* telah mengalami kemajuan seiring dengan progres ICT (Information and Communication Technology). ICT telah merubah tata kelola pemerintahan dengan melibatkan proses elektronik. Ke dalam model pemerintahan berjejaring (Katharina, 2021:14). Dalam kegiatan operasionalnya, pemerintah tidak dapat menjalankan urusannya sendiri. Pemerintah membutuhkan kerja sama dengan pihak lain seperti pihak swasta, LSM, dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh situasi tekanan ekonomi, tekanan sosial, kompetisi global, dan kepercayaan publik yang masih rendah.

Indonesia telah terlibat dalam Open Government Partnership (OGP) bersama dengan delapan negara lain diantaranya Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, dan Afrika Selatan (Mulyanto et al., 2022). Keterlibatan ini berupaya agar Indonesia dapat melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah dengan mengakselerasi pencapaian nasional. Salah satu bentuk Open Government Indonesia (OGI) melalui portal “Open Data” yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia secara efektif untuk memajukan kebijakan sosial. Open data ini telah direalisasikan di beberapa provinsi salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur yang akan menyajikan data – data dari seluruh

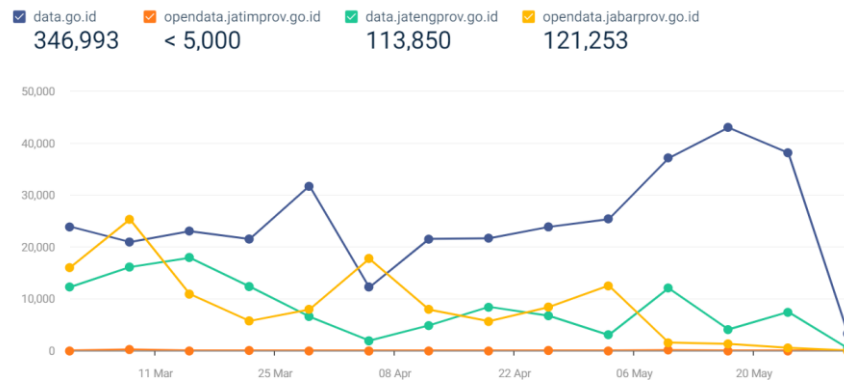
perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur dan seluruh pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur (Diskominfo, 2024).

Open Government Data (OGD) merupakan data yang disediakan secara gratis dan tersedia secara online dalam format yang dapat diakses, non-kepemilikan, dapat dibaca mesin, dan dilisensikan dengan cara tertentu sehingga dapat digunakan secara bebas, digunakan kembali, dan didistribusikan kembali oleh siapapun untuk tujuan komersial maupun tujuan non-komersial untuk mendorong inovasi melalui penggunaan kembali, Open Government Data (OGD) tidak bersisi mengenai informasi pribadi atau identitas pribadi apapun (Mustapa et al., 2022). Badan publik menghasilkan data dan informasi dalam jumlah besar. Dengan menyediakan data yang ada, pemerintahan akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, informasi yang diberikan dapat memperkuat demokrasi dengan memberikan masyarakat kontrol yang besar terhadap pemerintah, mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan, dan berkurangnya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Nurindahsari & Trisyanto, 2022).

Salah satu aspek penting dalam penerapan *open government data* yaitu transparansi dalam pelaporan keuangan. Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, transparansi merupakan praktik dalam memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui dengan jelas dan menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada masyarakat dan sejauh mana ketaatannya terhadap

peraturan hukum yang sedang berlaku. Dalam konteks e-government, transparansi laporan keuangan dapat dilakukan melalui website, seperti yang dicantumkan pada Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyajikan informasi mengenai laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Berbagai tindakan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat menunjukkan perkembangan dalam menerapkan prinsip *open data* dan sistem pemerintahan elektronik melalui rencana aksi nasional pemerintahan terbuka (Islami, 2021). Dalam perkembangan portal open data Jawa Timur, data yang dikelola dimulai oleh 16 Kabupaten/Kota yang diantaranya: Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Probolinggo, Kota Trenggalek, Kota Batu, Kab. Bojonegoro, Kab. Pamekasan, dan Kota Madiun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden 39/2019 mengenai Satu Data Indonesia (SDI) (Diskominfo, 2024). Berikut merupakan grafik minat masyarakat dalam mengetahui *website open data* di berbagai provinsi di pulau jawa terutama Jawa Timur dalam 3 bulan kebelakang yaitu bulan Maret hingga Mei.



Gambar 1: Grafik Jumlah Pengguna Portal *Open Data*

Sumber: SimilarWeb (2024)

Gambar 1 menunjukkan hasil analisis *website*, diketahui bahwa jumlah pengunjung dalam *website open data* masih tergolong sedikit, dimana dalam tiga bulan terakhir pengunjung *website* tidak mencapai jumlah dari masing – masing masyarakat di tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. Angka pengunjung harian di Provinsi Jawa Timur kurang dari 5.000 pengunjung, hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 41.416.407 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka tersebut tergolong sedikit yang hanya mencapai 0,04% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa timur dibandingkan dengan jumlah pengunjung *website open data* di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kendala *open government data* di Indonesia mencakup ketergantungan yang besar pada teknologi yang belum matang, kurangnya persiapan teknologi di kalangan masyarakat, kekurangan tenaga kerja yang terampil, dan kurangnya dorongan untuk memanfaatkan layanan *e-government*. Masyarakat banyak menganggap bahwa *Open Government Data* hanya

sebatas mengelola situs web yang menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas implementasi (Afrizal & Wallang, 2021). Dengan kendala tersebut minimnya niat pengguna *open government data* juga dapat menjadi penghambat dalam Implementasi dan pengembangan *open government data* terutama di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dibutuhkannya perhatian pemerintah terhadap masyarakat dengan memperkenalkan situs web pemerintahan dan mempertimbangkan kebutuhan khusus masyarakat yang akan mempengaruhi dan meningkatkan penggunaan *open government data* pada masyarakat.

Dilihat dari motivasi intrinsik masyarakat, maka segala bentuk perilaku dapat dilihat dari niat setiap individu untuk situs web akan menentukan niat masyarakat untuk menggunakan situs web tersebut. Beberapa penelitian terdahulu oleh (Permatasari & Suryaningrum, 2023) menunjukkan bahwa sikap warga terhadap *open government* berpengaruh terhadap niat warga untuk menggunakan *open government data*, namun kepercayaan pada pemerintah dan motivasi instrinsik tidak berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data*. Sedangkan berdasarkan penjelasan penelitian (Souza et al., 2022), menunjukkan sikap warga negara terhadap *Open Government Data* dan *Government 2.0* berpengaruh terhadap niat warga untuk menggunakan *open government data* serta kepercayaan pemerintah dan motivasi intrinsik berpengaruh terhadap sikap warga terhadap *open government data*. Pada penelitian (Wirtz et al., 2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap

niat warga negara untuk menggunakan *open government data* dan mempengaruhi niat mereka untuk menyebarkan informasi dari mulut ke mulut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, sikap warga untuk menggunakan *open government data* sangat penting untuk pemerintahan. Selain itu, transparansi, kepercayaan pada pemerintah, dan motivasi intrinsik pada *open government data* sangat memengaruhi niat masyarakat untuk menggunakannya. Maka penulis tertarik dan akan membahas penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Sikap, Transparansi, Kepercayaan pada Masyarakat, dan Motivasi Intrinsik Terhadap Niat Masyarakat untuk Menggunakan Open Government Data di Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sikap masyarakat berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap niat Masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur?

4. Apakah motivasi intrinsik berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sikap masyarakat terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh motivasi intrinsik terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - Dapat dijadikan sebagai sumber dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi.

- Dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membaca.
- Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh sikap masyarakat, transparansi, kepercayaan pada pemerintah, dan motivasi intrinsik terhadap niat masyarakat untuk menggunakan *Open Government Data* Provinsi Jawa Timur.